

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM EVALUASI LAPORAN INTEGRASI (SIEVLAPi) DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA TANGERANG

Mohamad Sohibul Ilma¹, Andi Pitono² & Hari Nur Cahya Murni³

^{1,2,3}Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta

Email Korespodensi: sohibulilman5@gmail.com

Email: andipitono@ipdn.ac.id; hncmunung9999@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation in public governance has encouraged local governments to develop information systems capable of improving transparency and accountability in development reporting. One of the innovations introduced by the Government of Tangerang City is the Integrated Reporting Evaluation System, which was designed to support the monitoring, evaluation, and reporting processes of regional government agencies in a more structured and integrated manner. This study aims to evaluate the implementation of the Integrated Reporting Evaluation System in supporting transparency and accountability in regional government reporting in Tangerang City. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving informants from the Regional Secretariat, the Regional Development Planning Agency, the Regional Financial and Asset Management Agency, the Department of Housing, Settlement Areas, and Land Affairs, the Department of Public Works and Spatial Planning, and district offices. The findings indicate that the implementation of the Integrated Reporting Evaluation System has generally contributed positively to the governance of regional development reporting. The system has accelerated the monitoring process of physical development activities and budget realization, improved the accessibility of information for regional leaders, and encouraged a transition from manual reporting mechanisms to a more standardized, measurable, and real-time digital reporting system.

Keywords: Evaluation, Integrated Reporting Evaluation System, Transparency, Accountability.

ABSTRAK

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pembangunan. Salah satu inovasi yang diterapkan Pemerintah Kota Tangerang adalah Sistem Evaluasi Laporan Integrasi, yang dirancang untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perangkat daerah secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIEVLAPi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang berasal dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKD Disperkimtan, Dinas PUPR, dan kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIEVLAPi secara umum telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pelaporan pembangunan daerah. Sistem ini mampu mempercepat proses monitoring kegiatan fisik dan realisasi anggaran, meningkatkan kemudahan akses informasi bagi pimpinan daerah, serta mendorong perubahan pola pelaporan dari mekanisme manual menuju sistem digital yang lebih terstandar, terukur, dan dapat dipantau secara real time.

Kata kunci: Evaluasi, SIEVLAPi, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada *good governance*, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama yang harus terwujud melalui proses administrasi pemerintahan daerah. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi kepada publik, tetapi juga mencakup kemudahan akses, kejelasan data, serta keterpaduan sistem yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menuntut setiap perangkat daerah untuk mampu menunjukkan capaian kinerja secara objektif, terukur, dan dapat diverifikasi. Terhadap hal tersebut, pemerintah pusat telah memberikan landasan normatif melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengarahkan setiap pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi, tidak terfragmentasi, serta mampu mendukung efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan informasi yang mendukung keterbukaan dalam pelaporan kinerja.

Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang menunjukkan komitmen dalam memperkuat sistem pelaporan kinerja melalui penerapan Sistem Evaluasi Laporan Integrasi (SIEVLAPi). SIEVLAPi tersebut merupakan sebuah sistem berbasis digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Tangerang untuk memfasilitasi proses evaluasi, pemantauan dan integrasi laporan perangkat daerah (PD) secara lebih terstruktur. Sistem ini dirancang agar seluruh PD dapat menyampaikan laporan kinerja, perencanaan, maupun realisasi kegiatan secara seragam dan mudah ditelusuri, sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data paket pekerjaan yang harus dilaporkan secara berkala melalui SIEVLAPi, terlihat bahwa kategori pengadaan barang merupakan aktivitas yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah 5.985 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 670.975.788.922,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program perangkat daerah masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan barang penunjang operasional dan pelayanan publik. Swakelola menempati posisi kedua sebanyak 3.611 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.425.366.871.257,-, yang mengindikasikan bahwa terdapat cukup banyak program yang direncanakan dan dilaksanakan secara mandiri oleh perangkat daerah tanpa melibatkan pihak ketiga. Pekerjaan konstruksi tercatat berjumlah 1.342 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.622.074.038.647,- yang mencerminkan pelaksanaan pembangunan atau peningkatan infrastruktur fisik, seperti jalan, drainase, fasilitas publik, atau bangunan layanan. Data tersebut memberikan gambaran bahwa variasi bentuk kegiatan yang dilaporkan melalui SIEVLAPi cukup beragam sesuai fungsi dan tugas perangkat daerah.

Kategori jasa konsultasi dan jasa lainnya masing-masing berjumlah 741 dengan jumlah anggaran Rp.61.266.041.044,- dan 2.404 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.645.287.974.986,-, yang menunjukkan adanya kebutuhan tenaga ahli dan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Pelaporan kegiatan jasa konsultasi biasanya terkait penyusunan dokumen perencanaan, kajian teknis, atau pendampingan pelaksanaan kegiatan, sedangkan jasa lainnya mencakup aktivitas yang bersifat pendukung operasional maupun pelayanan masyarakat. Melalui pelaporan ini, SIEVLAPi berperan tidak hanya sebagai alat dokumentasi kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen kendali dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran serta capaian kinerja. Variasi jumlah laporan pada tiap kategori dapat menjadi dasar evaluasi terkait efektivitas perencanaan kegiatan, proporsi belanja publik, serta sejauh mana perangkat daerah telah mengoptimalkan sistem pelaporan berbasis elektronik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah Kota Tangerang.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, terlihat riset *gap* yang jelas yaitu masih minimnya penelitian yang secara spesifik mengevaluasi sistem pelaporan internal yang terintegrasi dan menghubungkannya langsung dengan akuntabilitas serta transparansi di tingkat perangkat daerah. Sehingga, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki urgensi dan praktis untuk mengkaji implementasi

SIEVLAPi di Kota Tangerang, guna melihat bagaimana sistem ini digunakan, tantangan implementasinya, serta sejauh mana kontribusi SIEVLAPi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kota Tangerang.

Penelitian ini memposisikan SIEVLAPi bukan sekadar sebagai alat bantu teknis pelaporan, tetapi sebagai instrumen evaluasi yang berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui penerapan dimensi evaluasi kebijakan yang dikemukakan Dunn (2003), penelitian ini menilai sejauh mana sistem tersebut efektif dalam mencapai tujuan pelaporan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta memadai dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan. Kemudian menganalisis aspek kesesuaian dan responsivitas SIEVLAPi terhadap kebutuhan pengguna di berbagai perangkat daerah menjadi titik penting untuk melihat apakah sistem ini benar-benar mampu menjawab dinamika administrasi pemerintahan yang semakin menuntut transparansi.

Implementasi pada dasarnya merupakan rangkaian proses kegiatan yang melibatkan berbagai aktor untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi tidak berhenti pada tahap perumusan keputusan, melainkan berlanjut pada tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun institusi pemerintah dan non-pemerintah guna memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif. Tahap implementasi menjadi bagian yang sangat menentukan dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah arah dan tujuan kebijakan diuji melalui praktik di lapangan (Solichin, 2017). Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap program yang dijalankan.

Proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, baik yang berasal dari aspek organisasi, sumber daya, maupun lingkungan kebijakan itu sendiri. Menurut (Subarsono, 2021) menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Aparatur birokrasi sebagai pelaksana utama kebijakan memegang peranan penting, terutama terkait dengan karakteristik pejabat pelaksana, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi yang diterapkan. Efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aktor internal birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh peran aktor eksternal seperti masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Hoogerwerf dalam (Solichin, 2017) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak terlepas dari pemilihan dan penggunaan sarana yang tepat. Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai upaya pemanfaatan instrumen atau alat yang dipilih untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini, sarana tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan sistem dan infrastruktur pendukung, khususnya SIEVLAPi, yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang.

Implementasi juga dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan konkret yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut bertujuan menerjemahkan keputusan yang bersifat normatif ke dalam pola operasional yang dapat dijalankan secara nyata, sekaligus mendorong terjadinya perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil, sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan (Subarsono, 2021). Implementasi tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup upaya memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dijalankan serta dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melekat pada kebijakan pemerintah, yang mencakup pelaksanaan program-program oleh institusi publik dengan dukungan sarana, prasarana, dan mekanisme kerja yang memadai. Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan SIEVLAPi sebagai instrumen pelaporan kinerja perangkat daerah di Kota Tangerang, yang diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut (Subarsono, 2021) mengemukakan bahwa dalam praktiknya, lembaga pelaksana kebijakan sering dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan tuntutan yang beragam, sehingga memerlukan

kemampuan adaptasi dalam mengambil keputusan operasional. Kompleksitas implementasi tidak hanya disebabkan oleh banyaknya aktor yang terlibat, tetapi juga oleh dinamika lingkungan kebijakan yang terus berubah. Mazmanian dan Sabatier dalam (Solichin, 2017) menjelaskan bahwa fokus utama implementasi kebijakan terletak pada apa yang benar-benar terjadi setelah suatu kebijakan atau program ditetapkan. Implementasi mencakup berbagai aktivitas administratif serta upaya yang dilakukan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Implementasi tidak hanya dipahami sebagai proses internal birokrasi, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan menciptakan perubahan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

METODE

Dalam sebuah penelitian, perancangan desain penelitian memegang peranan yang krusial karena kegiatan ilmiah harus dijalankan secara terstruktur dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Creswell, 2017) *“Research designs are plans and the procedures for research that span the decisions from broad assumptions to detailed methods of data collection and analysis”*. Desain penelitian merupakan rangkaian rencana dan prosedur yang mencakup berbagai keputusan mulai dari asumsi dasar hingga metode rinci dalam pengumpulan serta analisis data. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa desain penelitian bukan sekadar tahapan teknis, tetapi kerangka menyeluruh yang mengatur bagaimana penelitian dilaksanakan dari awal hingga akhir.

Dalam penelitian ini, desain penelitian berfungsi sebagai pedoman yang memastikan proses pengumpulan informasi, penilaian terhadap fitur sistem, serta analisis terhadap praktik pelaporan perangkat daerah berjalan secara terarah. Dengan adanya desain penelitian yang jelas, peneliti dapat memahami langkah-langkah sistematis yang perlu ditempuh untuk menilai sejauh mana SIEVLAPi mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan di Kota Tangerang. Desain inilah yang membantu menjaga konsistensi prosedur, memperkuat objektivitas temuan, dan memastikan hasil penelitian valid serta relevan dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan sifat dan karakter data yang digunakan, penelitian dalam ilmu sosial umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif, serta metode campuran. Sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2017), pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertujuan menggali dan memahami makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri pemaknaan tersebut melalui penyusunan pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka, pengumpulan data langsung di lapangan, analisis secara induktif yang bergerak dari temuan khusus menuju pola umum, hingga proses interpretasi terhadap makna yang tersirat dalam data. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif menjadi relevan karena memungkinkan peneliti menangkap pengalaman, persepsi, dan praktik pelaporan yang dilakukan perangkat daerah secara lebih mendalam. Melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen, peneliti dapat memahami bagaimana sistem pelaporan terintegrasi ini diterapkan, kendala yang muncul, serta bagaimana aktor-aktor di dalamnya memaknai transparansi dan akuntabilitas yang berupaya dibangun melalui SIEVLAPi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana implementasi sistem benar-benar berfungsi mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian kualitatif, hasil temuan biasanya disusun dalam bentuk laporan yang fleksibel dan tidak mengikuti pola penulisan yang kaku. Bentuk laporan tersebut berkembang mengikuti dinamika data, konteks lapangan, serta makna yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Pendekatan ini menuntut peneliti untuk menggunakan cara berpikir induktif, yakni bergerak dari temuan-temuan spesifik menuju pemahaman yang lebih umum. Selain itu, peneliti juga perlu mampu menangkap pengalaman subjektif para partisipan serta memahami kompleksitas persoalan sosial secara menyeluruh.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Neuman, 2011) menjelaskan bahwa *“Emphasizes that qualitative research involves the development of theory as data are being collected. This inductive approach indicates*

that theories emerge from the data rather than being predetermined. Many qualitative studies employ grounded theory, which provides flexibility and allows a continuous interaction between data and theory throughout the research process. Penelitian kualitatif menekankan bahwa teori justru terbentuk seiring dengan proses pengumpulan data. Pendekatan induktif tersebut menunjukkan bahwa teori lahir dari data yang dianalisis, bukan ditetapkan sejak awal penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan *grounded theory* karena memberi ruang bagi interaksi yang terus menerus antara data dan konsep teoretis sepanjang proses penelitian. Dalam penelitian ini, fleksibilitas sangat relevan karena memungkinkan peneliti menangkap dinamika penggunaan sistem, memahami pengalaman pengguna secara mendalam, serta menafsirkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam praktik pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang.

PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi SIEVLAPi

Dimensi efektivitas dalam evaluasi menurut (Dunn, 2003) menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan sejak awal. Efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya suatu program, tetapi juga dari keberhasilan program tersebut dalam memberikan hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas SIEVLAPi di Kota Tangerang diukur dari kemampuan sistem dalam mendukung proses pelaporan perangkat daerah secara lebih cepat, terstruktur, transparan, dan akuntabel. Penilaian efektivitas mencakup sejauh mana SIEVLAPi mampu membantu perangkat daerah dalam menyampaikan laporan kegiatan fisik, realisasi keuangan, serta pembaruan jadwal pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan pengawasan pembangunan daerah.

Efektivitas implementasi SIEVLAPi tidak hanya dinilai dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sistem tersebut, tetapi juga dari kualitas pemanfaatannya dalam mendukung proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Sistem dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah. Selain itu, efektivitas juga terlihat dari kemampuan sistem dalam mengurangi keterlambatan pelaporan, meminimalkan ketidaksesuaian data antar perangkat daerah, serta meningkatkan keterhubungan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Keberhasilan SIEVLAPi tidak hanya terletak pada keberadaan aplikasi secara administratif, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan oleh pengguna dalam mendukung tata kelola pemerintahan.

Menurut (Winarno, 2018) efektivitas pelaksanaan suatu program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan organisasi dalam mengelola proses pelaksanaan secara menyeluruh. Perspektif ini relevan dalam implementasi SIEVLAPi, karena keberhasilan sistem sangat bergantung pada kesiapan aparatur perangkat daerah dalam memahami mekanisme penggunaan aplikasi, ketepatan dalam melakukan input data, serta konsistensi dalam memperbarui informasi secara berkala. Selain itu, dukungan kelembagaan dan komitmen pimpinan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sistem tidak hanya digunakan sebagai formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengendalian pembangunan yang efektif. Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila mampu menjawab kebutuhan organisasi secara tepat sasaran, mengurangi potensi kesalahan pelaporan, serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Efektivitas juga memiliki hubungan yang erat dengan mekanisme pengawasan, evaluasi internal, serta tindak lanjut terhadap hasil pelaporan yang dihasilkan melalui sistem. SIEVLAPi tidak hanya berfungsi sebagai media input data, tetapi juga sebagai sarana kontrol bagi pemerintah daerah untuk memantau progres kegiatan dan realisasi anggaran secara berkelanjutan. Apabila sistem mampu memberikan informasi yang valid dan dapat digunakan untuk mendeteksi keterlambatan pekerjaan maupun ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan, maka fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, efektivitas implementasi SIEVLAPi harus dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, bukan sekadar digitalisasi proses pelaporan semata.

Analisis terhadap dimensi efektivitas dilakukan melalui kajian dokumen, observasi penggunaan sistem, serta wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat langsung dalam implementasi SIEVLAPi, baik pada level perumusan kebijakan maupun pelaksanaan teknis di perangkat daerah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana sistem telah berjalan sesuai tujuan awalnya. Dengan melihat pengalaman langsung para pengguna, penelitian ini dapat menilai apakah SIEVLAPi benar-benar mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang. Berikut ini disajikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang memberikan pandangan langsung mengenai efektivitas implementasi SIEVLAPi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil wawancara dengan Informan II mengatakan:

“Efektivitas implementasi SIEVLAPi itu sebenarnya bisa dilihat dari seberapa jauh sistem ini mampu menghasilkan laporan yang memang sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi bukan hanya soal laporan itu masuk tepat waktu, tetapi juga bagaimana kualitas informasi yang disampaikan di dalamnya. Kadang laporan memang sudah diinput, tetapi kalau datanya tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan tentu akan menyulitkan dalam proses evaluasi. Karena itu, keberhasilan SIEVLAPi bukan hanya dilihat dari sisi administrasi saja, melainkan apakah data yang dimasukkan benar-benar menggambarkan progres kegiatan yang sebenarnya dan bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah, khususnya Pak Sekda. Jadi ketepatan waktu, kelengkapan data, dan kesesuaian antara laporan dengan kondisi aktual itu menjadi ukuran penting dalam melihat efektivitas sistem ini”.

Efisiensi Implementasi SIEVLAPi

Dimensi efisiensi dalam teori evaluasi menurut (Dunn, 2003) menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, baik dari segi waktu, biaya, tenaga, maupun sarana pendukung lainnya. Efisiensi tidak hanya diukur dari tercapainya hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana proses pelaksanaan dapat dilakukan dengan pengorbanan sumber daya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini, efisiensi implementasi SIEVLAPi di Kota Tangerang dinilai dari kemampuan sistem dalam menyederhanakan proses pelaporan perangkat daerah sehingga menjadi lebih cepat, hemat waktu, serta mampu mengurangi beban administratif yang sebelumnya banyak bergantung pada mekanisme manual. Penilaian efisiensi mencakup sejauh mana SIEVLAPi mampu mempercepat penyampaian laporan kegiatan fisik, realisasi keuangan, serta pembaruan jadwal pekerjaan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efektif.

Efisiensi implementasi SIEVLAPi tidak hanya dilihat dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sistem tersebut, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu mengurangi duplikasi pekerjaan, mempercepat proses verifikasi data, serta mempermudah koordinasi antar perangkat daerah. Sistem dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan proses pelaporan yang lebih sederhana, meminimalkan penggunaan dokumen manual, serta mengurangi keterlambatan akibat proses birokrasi yang berulang. Selain itu, efisiensi juga tercermin dari kemampuan sistem dalam menyediakan data yang cepat diakses oleh pimpinan daerah tanpa harus menunggu laporan disampaikan secara bertahap dari masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, keberadaan SIEVLAPi tidak hanya memberikan kemudahan administratif, tetapi juga menciptakan proses kerja yang lebih praktis, responsif, dan terukur dalam mendukung pengendalian pembangunan daerah.

Lebih lanjut menurut (Dunn, 2003), efisiensi dalam pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara tepat guna, termasuk kesiapan sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta kesesuaian prosedur kerja yang diterapkan. Perspektif ini relevan dalam implementasi SIEVLAPi karena keberhasilan sistem sangat bergantung pada kemampuan aparaturnya perangkat daerah dalam memanfaatkan aplikasi secara optimal, memahami alur

pelaporan, serta menghindari pengulangan pekerjaan akibat ketidakterpaduan sistem. Dalam praktiknya, efisiensi akan sulit tercapai apabila masih terdapat penginputan ganda pada sistem yang berbeda, keterlambatan pembaruan data, atau kurangnya integrasi antar sistem. Oleh karena itu, suatu sistem dapat dinilai efisien apabila mampu menghemat waktu kerja, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta meningkatkan produktivitas aparatur dalam melaksanakan tugas pelaporan.

Efisiensi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal yang berkelanjutan. SIEVLAPi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian laporan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung percepatan pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang lebih cepat dan akurat. Apabila sistem mampu menampilkan progres kegiatan, realisasi anggaran, dan potensi hambatan secara langsung, maka pimpinan daerah dapat segera melakukan tindak lanjut tanpa harus menunggu proses pelaporan manual yang memerlukan waktu lebih lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan sumber daya administratif, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas respons pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Analisis terhadap dimensi efisiensi dilakukan melalui observasi terhadap penggunaan sistem, serta wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat langsung dalam implementasi SIEVLAPi, baik pada tingkat perumusan kebijakan maupun pelaksanaan teknis di perangkat daerah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana sistem telah mampu menciptakan proses pelaporan yang lebih sederhana, cepat, dan hemat sumber daya. Dengan memahami pengalaman langsung para pengguna, penelitian ini dapat menilai apakah SIEVLAPi benar-benar memberikan efisiensi dalam tata kelola pelaporan perangkat daerah serta mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembangunan di Kota Tangerang.

Berikut ini disajikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang memberikan pandangan langsung mengenai efisiensi implementasi SIEVLAPi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil wawancara dengan Informan II mengatakan:

“SIEVLAPi ini sebenarnya cukup membantu karena proses pelaporan sekarang jadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang masih banyak pakai cara manual. Dulu perangkat daerah harus menunggu rekap laporan satu per satu, kadang juga harus kirim berkas secara bertahap, jadi memang cukup memakan waktu. Sekarang dengan adanya sistem ini, progres kegiatan, realisasi anggaran, sampai jadwal pekerjaan bisa langsung diinput dan dipantau lewat dashboard. Tapi memang, kadang kendalanya masih ada kalau perangkat daerah terlambat input atau datanya belum lengkap, jadi proses evaluasinya juga ikut terhambat”.

Kecukupan Implementasi SIEVLAPi

Dimensi kecukupan (*adequacy*) dalam teori evaluasi (Dunn, 2003) menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu memberikan tingkat pemenuhan yang memadai terhadap kebutuhan, masalah, atau tujuan yang ingin diselesaikan. Kecukupan tidak hanya dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program secara administratif, tetapi lebih menekankan pada apakah hasil yang dicapai benar-benar cukup untuk menjawab persoalan yang ada secara substansial. Dalam implementasi SIEVLAPi dinilai dari kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaporan perangkat daerah, khususnya dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penilaian kecukupan mencakup sejauh mana SIEVLAPi mampu menyediakan informasi yang lengkap, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pimpinan daerah dalam memantau kegiatan fisik, realisasi keuangan, serta jadwal pekerjaan secara berkelanjutan.

Kecukupan implementasi SIEVLAPi tidak hanya diukur dari tersedianya sistem pelaporan berbasis digital, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjawab kebutuhan riil perangkat daerah dalam proses pelaporan dan evaluasi pembangunan. Suatu sistem dapat dikatakan memadai apabila mampu menyediakan data yang cukup akurat, lengkap, dan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai

dasar pengawasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, kecukupan juga tercermin dari kemampuan sistem dalam mengurangi kekurangan yang sebelumnya muncul pada mekanisme pelaporan manual, seperti keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian data antar perangkat daerah, serta lemahnya keterhubungan antara perencanaan dan realisasi kegiatan. Dengan demikian, keberadaan SIEVLAPi tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu memenuhi kebutuhan pengendalian pembangunan secara lebih menyeluruh.

Menurut (Dunn, 2003), kecukupan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana implementasi tersebut mampu memberikan solusi yang proporsional terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi. Perspektif ini relevan dalam implementasi SIEVLAPi karena keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada keberadaan aplikasi, tetapi pada kemampuannya dalam menjawab kebutuhan perangkat daerah terhadap sistem pelaporan yang terintegrasi, mudah digunakan, dan mampu menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, kecukupan akan sulit tercapai apabila sistem belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lain seperti SIPD, masih terdapat keterbatasan dalam kelengkapan data, atau pengguna belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan yang benar. Oleh karena itu, suatu sistem dapat dinilai cukup apabila mampu memberikan dukungan yang memadai terhadap proses pelaporan, mengurangi hambatan administratif, serta memperkuat kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Kecukupan juga memiliki hubungan yang erat dengan mekanisme pengawasan, evaluasi internal, dan tindak lanjut terhadap hasil pelaporan yang dihasilkan melalui sistem. SIEVLAPi tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasukkan data kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang mendukung pimpinan daerah dalam memantau perkembangan pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Apabila sistem mampu menyajikan informasi yang lengkap mengenai progres fisik, serapan anggaran, serta kendala pelaksanaan kegiatan, maka proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih tepat dan keputusan korektif dapat segera diambil. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga dengan sejauh mana informasi tersebut mampu menjawab kebutuhan pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah secara nyata.

Melalui observasi terhadap penggunaan sistem, kajian dokumen pendukung, serta wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat langsung dalam implementasi SIEVLAPi, baik pada level kebijakan maupun pelaksanaan teknis di perangkat daerah, diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana sistem telah mampu memenuhi kebutuhan pelaporan dan pengawasan pembangunan daerah secara memadai. Melalui pengalaman langsung para pengguna, penelitian ini dapat menilai apakah SIEVLAPi benar-benar telah memberikan dukungan yang cukup dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang.

Berikut ini disajikan hasil wawancara dengan beberapa informan yang memberikan pandangan langsung mengenai kecukupan implementasi SIEVLAPi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil wawancara dengan Informan I1 mengatakan:

“Pada dasarnya sudah cukup membantu karena menu yang tersedia seperti pelaporan kegiatan fisik, realisasi anggaran, dan jadwal pekerjaan sudah bisa dipakai untuk kebutuhan monitoring sehari-hari. Karena semua data bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem dan pimpinan juga lebih cepat melihat perkembangan kegiatan. Ada beberapa hal yang dirasa belum cukup, terutama karena SIEVLAPi belum terintegrasi dengan SIPD sehingga beberapa data tetap harus diinput kembali pada sistem lain”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I1, bahwa kecukupan dalam implementasi SIEVLAPi telah menunjukkan adanya pemenuhan kebutuhan dasar pelaporan perangkat daerah, khususnya pada pelaporan kegiatan fisik, realisasi anggaran, dan jadwal pekerjaan. Keberadaan menu dalam SIEVLAPi membantu proses monitoring dan dipantau oleh pimpinan secara lebih cepat. Namun, kecukupan sistem ini belum sepenuhnya optimal karena SIEVLAPi belum terintegrasi dengan SIPD, sehingga masih terjadi penginputan ulang pada sistem lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pelaporan belum

terpenuhi secara menyeluruh karena masih terdapat pekerjaan administratif tambahan yang mengurangi optimalisasi sistem.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Evaluasi Laporan Integrasi (SIEVLAPi) dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang, dapat disimpulkan sebagai berikut: Evaluasi Implementasi SIEVLAPi berdasarkan 6 dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, penerapan SIEVLAPi di Pemerintah Kota Tangerang telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Faktor pendukung implementasi SIEVLAPi terletak pada tersedianya *dashboard* pelaporan yang terpusat, keseragaman format pelaporan antar perangkat daerah, keberadaan fitur dokumentasi monitoring kegiatan fisik, realisasi keuangan, dan jadwal pekerjaan, serta komitmen pimpinan daerah dalam memanfaatkan SIEVLAPi sebagai instrumen pengawasan pembangunan. Untuk Faktor penghambat yang masih memengaruhi optimalisasi implementasi, yaitu belum terintegrasinya SIEVLAPi dengan SIPD yang menyebabkan penginputan ganda, keterlambatan pembaruan data oleh perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia khususnya pada tingkat kecamatan, tingginya beban kerja administratif yang menyebabkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas sistem belum berjalan secara maksimal. Upaya Pemerintah Kota Tangerang untuk peningkatan implementasi SIEVLAPi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah, dilakukan melalui peningkatan disiplin aparatur dalam pembaruan data dengan penguatan komitmen organisasi, evaluasi berkala, serta mekanisme pengawasan internal yang lebih konsisten.

REFERENSI

- Adelia Sakinah Rahmah, Y. (2024). Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Utara Berbasis WEBSITE. *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, 5(1), 74–87. <https://doi.org/10.46576/djtechno>
- Agustino, L. (2023). *Memahami Evaluasi kebijakan (Prespektif Teoritis dan Praktis)*. Empatdua Media.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed: Edisi Keempat*. Dapadeda, A., Wahju, A., & Emanuel, R. (2023). SIDARLIN: Evaluasi Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik pada Disdukcapil Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 12(3), 857–864. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i3.73937> SIDARLIN:
- Dewi, H., Yuningsih, Y., Centia, S., Pemerintah, S. A., Padjadjaran, U. (2022). Evaluasi E-Government dalam Pelayanan perizinan Online melalui WEBSITE HAY.U Bandung dan Aplikasi Gampil Tahun 2022 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun 2022). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 4(1), 46–61.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2024). *Tata Kelola Pemerintahan Adaptif: Inovasi dan Transformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. (2020). *Reformasi Administrasi Publik: Tantangan dan Peluang*. Universitas Gajah Mada Press.
- Dwiyanto, Agus. (2015). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*. Gadjah Mada University Press.
- Firyal Akbar, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). In *Ideas Publishing*. Ideas Publishing.
- Hunairah, A., & Syamsu, R. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2), 464–478.
- Jangku, W. S., Candiasa, I. M., & Sunarya, I. M. G. (2024). Evaluasi Kualitas E-Government

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

270

Indexed



SINTA 4



- Menggunakan Metode E-Govqual, Importance Performance Analysis (IPA) dan Heuristic Evaluation. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 4(4), 2294–2306. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i4.1671>
- Kothari, C. R. (2012). *Research Methology: An Introduction*. In *Research Methodology*. Methods and Techniques.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosda Karya.
- Nabiilah, L., & Imanuari, V. (2025). Responsiveness in the digital governance system for complaint services at the East Java Provincial Education Office. *SATWIKA Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 9(2), 397–408. <https://doi.org/https://doi.org/10.22210/v9i2.40882>
- Ndraha, T. (2015). *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Yayasan Karya Dharma.
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. In Pearson Education.
- Nugraha, A. (2021). Integrasi Sistem Pelaporan Elektronik dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 61–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jip.v7i1.2021>
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy Edisi 6*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers.
- Pramesti, D., & Hidayat, R. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan dalam Mendukung Efektivitas dan Kecukupan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 155–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jap.v18i2.2022>
- Putri, R., & Rahmawati, D. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–158.
- Sedarmayanti. (2024). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Mandar Maju.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 193–208.
- Siagian, S. P. (2019). *Teori Administrasi Publik Kontemporer*. Bumi Aksara.
- Sjamsiar Sjamsudin Indradi. (2017). *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*. Deepublish.
- Solichin, A. W. (2017). *Analisa Kebijakan Dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarti, T., Damanhuri, D. S., Sjaf, S., Law, V.. (2022). Transparency of Local Financial Management: Evidence from Local Governments in Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 6(1), 50–70. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5433>
- Supriatna, T. (2016). *Administrasi Publik Partisipatif*. Rafika Aditama.
- Suradinata, E. (2014). *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Ramadhan.
- Syafei, I. K. (2017). *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Rafika Aditama.
- Taufik, Liwaul, S. (2023). Analisis faktor keberhasilan implementasi kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten konawe selatan. *Journal Publicho*, 6(2), 507–524. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134>
- Thoha, M. (2016). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenadamedia Group.
- Zamzani, R., & Kurniati, R. R. (2025). Bureaucratic transformation in realizing responsive and accountable public services. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 7(2), 219–228. <https://doi.org/10.33474/jisop.v7i2.24479>